

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Energi listrik dimulai pada 19 abad terakhir. PLN telah mengubah banyak perubahan selama periode penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian, pada 19 Desember 1964 Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU - PLN) dibubarkan dan dibentuk 2 (dua) BUMN. Mereka adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola energi listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola energi gas.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat

yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

Di Provinsi Lampung, khususnya di Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, bisnis kelistrikan dikelola oleh PT PLN Area Lampung, Cabang Tanjung Karang yang terletak di jalan Pangeran Diponegoro No. 14, Tanjung Karang Bandar Lampung. Ini adalah cabang dari PT. PLN Wilayah Lampung, cabang Tanjung Karang mengawasi 2 (dua) wilayah. Yaitu Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. PT.PLN Lampung Area Cabang Tanjung Karang memiliki 7(tujuh) subdivisi, yaitu:

1. Subdivisi Tanjung Karang
2. Subdivisi Teluk Betung
3. Subdivisi Kalianda

4. Subdivisi Natar
5. Subdivisi Sidomulyo
6. Subdivisi Sutami
7. Subdivisi Way Halim

2.2 Visi Misi Perusahaan

2.2.1 Visi Perusahaan

Visi PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung yaitu menjadi Unit PLN yang Mampu Memberikan Pelayanan Kepada Pelanggan Secara Efektif, Efisien & Transparan.

2.2.2 Misi Perusahaan

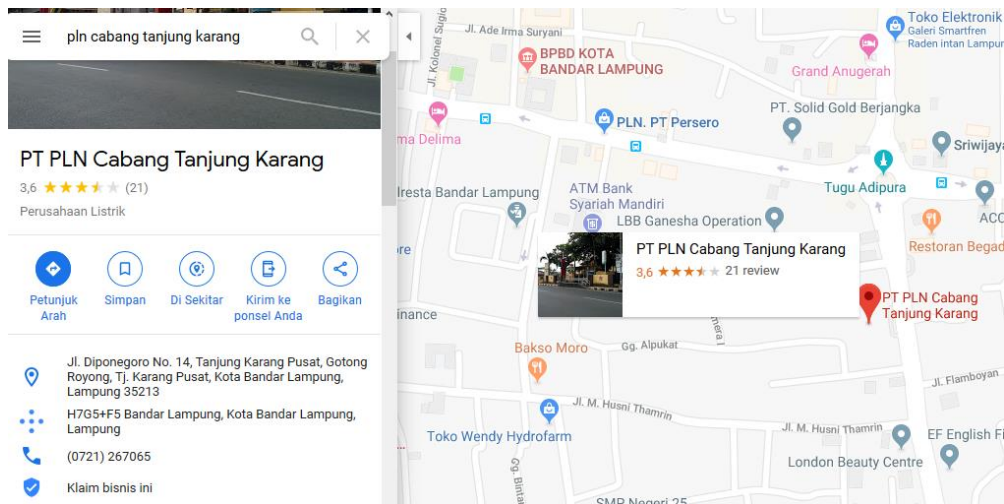
1. Memberikan Pelayanan Secara Cepat Dan Tepat.
2. Melakukan Pelayanan Secara Transparan Baik dari Sisi Waktu & Biaya.
3. Mengembangkan Kualitas Pelayanan Secara Kontinyu Dengan Mengutamakan Kepuasan Pelanggan.

2.3 Bidang Usaha / Kegiatan Utama Perusahaan

Kegiatan Utama Perusahaan yaitu penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

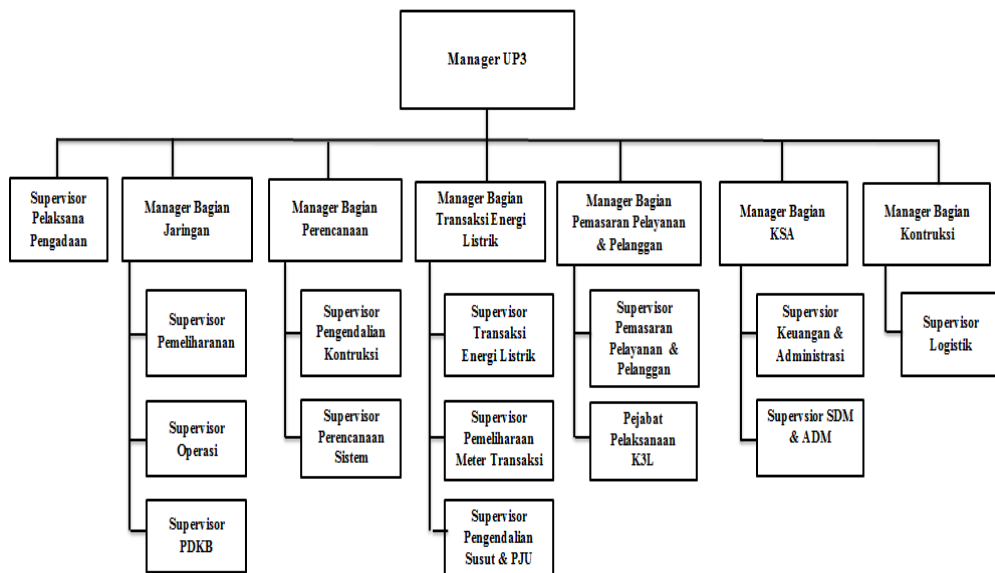
2.4 Lokasi Perusahaan

Lokasi Perusahaan PT PLN Area Lampung, Cabang Tanjung Karang yang terletak di jalan Pangeran Diponegoro No. 14, Tanjung Karang Bandar Lampung, Lampung 35213.



Gambar 2.1 Lokasi Perusahaan

2.5 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi

